

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, *epidemi*, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen Indonesia terhadap bencana nasional khususnya setelah Tsunami Aceh.

BPBD termasuk BPBD Kota Medan dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif baru tersebut memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana yang berfokus pada penanggulangan risiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tugas penanggulangan

bencana-bencana diatur dalam tiga divisi dan BPBD yaitu kesiap siagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Meskipun BPBD sudah diberikan kewenangan dalam penanggulangan bencana, kenyataan di lapangan terdapat permasalahan khususnya di BPBD Kota Medan seperti keterbatasan pengembangan sumber daya manusia yang mengenal dan mengetahui bencana alam.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini, yakni : **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus Bencana Alam Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan).**

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Belum tercukupinya kemampuan dan intelektual sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam hal peningkatan kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Tingkat dan luas wilayah Kota Medan dengan ragam bentuk bencana alam

## **I.3. Pembatasan Masalah**

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardi (2003 :1) adalah :  
“Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal-

soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sebelumnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan yang telah diuraikan terdahulu maka perlu pula dilakukan pembatasan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diajukan.

Disebabkan keterbatasan waktu biaya dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Medan Labuhan.

#### **I.4. Perumusan Masalah**

Menurut Hatta (2000 : 14) :

“Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.



Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kasus-kasus bencana di Kecamatan Medan Labuhan”.

### **I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kasus bencana di Kecamatan Medan Labuhan
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam rangka meningkatkan kemampuan instansi tersebut dalam penanggulangan bencana
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area